

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki pengertian luas dan dapat diartikan sebagai proses dengan berbagai metode sehingga orang yang sedang menempuh pendidikan memperoleh pengetahuan, dan memiliki keterampilan serta sikap yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul di tahun 2024. Undang-undang no 20 tahun 2003 menjelaskan mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum dalam membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan memajukan hak asasi manusia.

Setiap manusia berhak atas pendidikan dan berhak memilih untuk jenis pendidikan apa yang sesuai dengan kebutuhan baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Menurut (Syaadah et al., 2023, hlm. 125) pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan pada jalur persekolahan yang runtut dan jelas yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang lebih banyak diminati dan didukung oleh program pemerintah, seperti program wajib belajar 12 tahun. Tetapi, kenyataan dilapangan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menempuh jalur pendidikan formal, mereka yang terhalang karena beberapa faktor seperti masalah ekonomi, *dropout*, atau memiliki kebutuhan lain memilih untuk sekolah melalui jalur pendidikan non formal.

Menurut Marzuki dalam (Syaadah et al., 2023, hlm. 125) menjelaskan bahwa pendidikan non formal merupakan kegiatan pembelajaran diluar sistem pendidikan formal dan dilaksanakan secara terorganisir. Pendidikan non formal menurut (Jihan et al., 2022, hlm. 78) memiliki fungsi sebagai penambah, pengganti, dan juga sebagai pelengkap dari pendidikan formal, program dari pendidikan non formal. Sehingga program dari pendidikan non formal ini sangat cocok untuk dijadikan salah satu alternatif memilih sekolah. Meskipun dijadikan alternatif pendidikan non formal memiliki beberapa kekhasan dalam

penyelenggarannya, diantaranya menurut (Syarifuddin, 2010, hlm. 50) memiliki ciri khas dalam paradigma konseptual, perencanaan, tujuan, proses pembelajaran dan proses evaluasi pembelajaran yang menjadi pembeda dengan pendidikan non formal.

Dalam pelaksanaannya lembaga pendidikan non formal melibatkan peserta didik atau warga belajar dalam proses penyusunan pembelajaran sampai proses evaluasi. Sehingga tutor mengetahui apa yang sedang dibutuhkan atau metode seperti apa yang cocok diterapkan untuk warga belajar. Pendidikan non formal memiliki beberapa satuan termasuk beberapa program didalamnya, salah satu satuan pendidikan non formal adalah PKBM. PKBM menurut Uberto Sihombing dalam (Kamil, 2011, hlm. 85) didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dikembangkan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh masyarakat dan dapat membangun dirinya secara mandiri sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

PKBM berangkat dari kebutuhan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pembelajaran, dan memiliki misi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain itu, PKBM memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah formal, seperti memiliki kendala ekonomi, *drop out*, ataupun kendala lain. Waktu yang fleksibel menjadi salah satu alasan untuk bisa tetap melanjutkan sekolah dan hak manusia untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi.

Kesempatan untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat bukan tanpa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh PKBM menurut (Himayaturrahmah, 2017, hlm. 101) yang umum terjadi di masyarakat yaitu mengenai sarana dan prasarana, keterbatasan dana, kurangnya motivasi belajar dari warga belajar, kualitas pengelolaan PKBM, dan permasalahan lainnya. Hal tersebut terutama permasalahan pengelolaan PKBM menjadi kendala dalam pengembangan PKBM dan berdampak pada eksistensi PKBM itu sendiri. Laman dapodik tahun 2023 menunjukkan terdapat 10.062 PKBM di Indonesia, 2.111 diantaranya berada di Jawa barat, dan 55 diantaranya ada berada di Kabupaten

Tasikmalaya. Penelitian mengenai PKBM pernah dilakukan salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya dan hasil dari penelitian menurut (Kartini, 2022, hlm. 12) PKBM di Kabupaten Tasikmalaya pada awalnya berjumlah 110, namun yang aktif sekitar 45 PKBM. Permasalahan tersebut salah satunya berkaitan dengan pengelolaan dari PKBM yang belum maksimal dan masih banyak yang perlu dikembangkan.

Permasalahan mengenai pengelolaan menjadi salah satu masalah yang serius, karena permasalahan ini sangat menentukan arah pengembangan PKBM kedepannya, baik dalam pengelolaan ataupun pembelajaran. Pengelolaan yang kaitannya dengan pengelolaan PKBM memiliki peran yang penting dalam layanan kepada warga belajar. Menurut (Himayaturohmah, 2017) kualitas layanan PKBM akan sangat menentukan keberhasilan program PKBM berkaitan dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Permasalahan lain yang berkaitan dengan PKBM berkaitan dengan masalah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan tutor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, PKBM khususnya di Kabupaten Tasikmalaya memiliki fenomena yang unik yaitu terdapat beberapa PKBM *ghaib*. Dimana PKBM tersebut tidak memiliki Tata Usaha (TU) sebagai pengelola PKBM dan dari jumlah warga belajar yang terhitung ratusan terdaftar hanya nama saja sedangkan pada kenyataannya dalam pembelajaran ataupun ujian yang datang tidak sejumlah yang terdaftar.

Peningkatan dari kualitas PKBM bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satu dengan pengembangan yang dilakukan oleh FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya yang mewadahi PKBM se-Indonesia. Menurut (Zulkarnain & Apelia, 2022, hlm. 3726) FK-PKBM merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menjasi tempat berkumpulnya Lembaga PKBM dan Profesi Pengelola PKBM di seluruh Indonesia. FK-PKBM memiliki wilayah kerja dari FK-PKBM meliputi wilayah kerja pusat, wilayah kerja kabupaten, dan wilayah kerja kota. Pada tahun 2023 FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya menaungi sejumlah 55 PKBM dan 1 SKB dari jumlah tersebut hanya 44 PKBM

dan 1 yang aktif berkegiatan. FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa program untuk mengembangkan PKBM di Kabupaten Tasikmalaya.

Peran dari FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya tentunya mendukung dalam PKBM yang dinaungi. Salah satunya, Dalam pengembangan PKBM program yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dari PKBM yang dinaungi. Salah satunya program mengenai manajerial PKBM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hanizar et al., 2014, hlm. 7) menyatakan bahwa pengelolaan dari PKBM harus memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga akan berdampak pada terakreditasinya program dan lembaga yang sedang dikelola.

Dalam salah satu kegiatan yang di selenggarakan oleh FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya yang di ikuti oleh peneliti ditemukan bahwa dari 55 PKBM dibawah naungan FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya hanya 2 PKBM yang sudah mendaftar dan mengaplikasikan aplikasi Setara Daring. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dibuatkan oleh pemerintah khusus untuk Pendidikan Kesetaraan tetapi banyak PKBM yang belum mengetahuinya. Selain itu melakukan pelatihan untuk mengakses aplikasi Setara Daring, pada program tersebut juga dilakukan pelatihan mengenai aplikasi Canva, Google form, dan Quizziz. Dan hasilnya masih terdapat pengelola PKBM yang belum menguasai aplikasi tersebut.

Peran yang dilakukan oleh FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan PKBM diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap mengembangkan PKBM di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai organisasi yang menjadi wadah dalam silaturahmi antar PKBM untuk mengembangkan PKBM, sejauh mana FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi wadah untuk mengembangkan PKBM. Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Non formal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1.2.1 Pengelolaan dari PKBM masih kurang optimal.

1.2.2 Pengelola PKBM masih belum terlalu memahami tentang IPTEK.

1.2.3 Kurangnya eksistensi dari PKBM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana peran Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Non formal?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui peran Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Non formal.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai salah satu kajian tentang FK-PKBM Kabup5aten Tasikmalaya dalam pengembangan PKBM. Menjadi sumber referensi bagi penelitian penulisan karya ilmiah selanjutnya serta hasil penelitian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat menambah pemahaman mengenai pengembangan PKBM. Masyarakat lebih mengetahui mengenai peran FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya dalam pengembangan PKBM.

1.5.2.2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Bagi PKBM, penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada kepala, pengelola, ataupun tutor mengenai bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas PKBM.

1.5.2.3 Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan pengalaman dan wawasan mengenai peran FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya dalam pengembangan PKBM.

1.5.2.4 Institusi

Bagi institusi, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik sebagai bahan masukan kepada FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya melakukan evaluasi kinerja organisasi.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Peran Lembaga

Peran lembaga adalah suatu keputusan yang dijalankan oleh lembaga kemudian memiliki kaitan dengan menjaga kebutuhan anggota, sebagai tempat belajar, serta mewujudkan kemandirian para anggotanya.

1.6.2 Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kabupaten Tasikmalaya

FK-PKBM Kabupaten Tasikmalaya adalah perkumpulan yang terdiri atas beberapa PKBM mempunyai tujuan untuk mengembangkan anggota yang ada didalamnya. FK-PKBM berkedudukan di Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, di Kabupaten Tasikmalaya FK-PKBM menaungi 55 PKBM.

1.6.3 Lembaga Pendidikan Non Formal

Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan yang berlangsung di luar pendidikan formal. Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun swaadaya dari masyarakat. Salah satu dari lembaga pendidikan non formal adalah PKBM yang menjadi salah satu pusat pembelajaran bagi masyarakat selain pendidikan formal seperti sekolah.

1.6.4 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Upaya yang dilakukan oleh pengelola ataupun mitra lainnya untuk mengembangkan PKBM yang meliputi perbaikan pengelolaan dari PKBM dari segi manajerial keuangan, pengajaran, pengelolaan sarana dan prasarana untuk

meningkatkan kualitas PKBM. Tentunya hal tersebut memerlukan pengembangan ke arah yang lebih dan profesional.